

## ***HARD BALANCING* RUSIA DAN TURKI DALAM KONFLIK SURIAH 2012-2015**

Oleh:

**HAYDHAR MUHAMMAD BACHTIAR**

(Alumni Departemen Hubungan Internasional Fisip Universitas Hasanuddin)

Email: haydharmhb@gmail.com

**AGUSSALIM BURHANUDDIN**

(Dosen Departemen Hubungan Internasional Fisip Universitas Hasanuddin)

Email: agussalim.fisip@unhas.ac.id

### ***Abstract***

*The Syrian conflict that has been raging since 2011, has involved external actors including Russia and Turkey in a rivalry model of "hard balancing." Those two countries support different contested parties in the Syrian conflict. This article is aimed to describe the background, forms, and the impact of the hard-balancing rivalry between Russian and Turkey in the conflict. Russia's involvement in the conflict is to back up Bashar al Assad's regime politically and militarily in order to protect its military and economic interests in the region, while Turki provides supports to the rebels. The rivalry between the the two countries has made the Syrian conclit more complicated and long-drawn.*

**Keywords:** *hard balancing, the Syrian conflict.*

### **Abstrak**

Konflik di Suriah yang berlangsung sejak tahun 2011 telah melibatkan aktor eksternal termasuk Rusia dan Turki dalam bentuk *hard balancing* dengan mendukung pihak berbeda dalam konflik Suriah. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang, bentuk, serta dampak rivalitas *hard balancing* Rusia dan Turki dalam konflik Suriah. Kehadiran Rusia dalam konflik ini untuk mendukung rezim Bashar al Assad secara politik dan militer dan melindungi kepentingan militer dan ekonominya di kawasan, sedangkan Turki memberikan dukungan terhadap kelompok pemberontak. Rivalitas kedua negara tersebut mengakibatkan konflik Suriah semakin kompleks dan berkepanjangan.

**Kata kunci:** hard balancing, konflik Suriah

### **PENDAHULUAN**

Konflik Suriah merupakan imbas dari gerakan sosial-politik yang melanda sejumlah negara-negara Timur Tengah pada dekade kedua millennia. Gerakan demokratisasi dan tuntutan restrukturisasi politik yang awalnya berupa demonstrasi damai berkembang menjadi konflik terbuka antara pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok penentang Rezim Bashar al-Assad. Konflik yang

berkembang meluas ke sejumlah kota dan wilayah Suriah, memancing keterlibatan aktor-aktor eksternal dengan posisi dan kepentingan berbeda-beda. Rusia dan Turki adalah dua negara yang memiliki kepentingan berbeda dalam masalah Suriah, kemudian muncul sebagai dua rival yang berebut pengaruh dalam bentuk *hard balancing*.

Pada akhir tahun 2010 dan awal tahun 2011 terjadi fenomena *Arab Spring* di timur tengah. Berawal dari aksi membakar diri salah satu pedagang kecil di kota Siti Bouzid yaitu Mohamed Bouazizi bakar diri sebagai symbol protes terhadap kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian Tunisia.<sup>1</sup> Fenomena ini membuat sebagian negara-negara Arab yang berkarakteristik diktator perlahan-lahan berubah menjadi negara-negara yang demokratis. Gelombang tersebut menghempas Tunisia, Libya, Mesir, Jordan, Morocco, Suriah, Aljazair, Bahrain, Yaman, dan Oman. Masing-masing negara mempunyai cerita berbeda akan berjalan dan berakhirnya pemberontakan terhadap rezim mereka tetapi berawal dengan sama. Kepemimpinan yang diktator setelah puluhan tahun membuat masyarakat jenuh akibat hidup dalam kemiskinan. Tunisia, Libya, dan Mesir telah mendapatkan pemimpin dengan cara demokratis walaupun negara-negara tersebut belum bisa dikatakan stabil karena masih sering terjadi gejala-gejala politik. Tunisia, Mesir, dan Libya adalah negara-negara yang terhempas gelombang demokratisasi Timur Tengah yang dalam prosesnya tidak berjalan secara damai. Negara-negara ini mengalami prosos revolusi yang cepat dan drastis juga memakan korban. Revolusi ini bermula dari kejadian perorangan yang kemudian berlanjut ke aksi massa yang semakin besar, dilanjutkan oleh tindakan represif dari rezim, dan berakhir pada kemenangan oleh rakyat.

Gelombang demokratisasi tersebut masuk ke dalam Suriah yang juga merupakan bagian dari Timur Tengah. Bermula ditangkapnya lima belas anak-anak yang mencoret dinding sekolah yang berada di Kota Daraa dengan tulisan arab "*The People want to overthrow of the regime*" bulan February 2011.<sup>2</sup> Kejadian tersebut praktis membuat para penduduk yang berada di kota tersebut melaksanakan aksi demonstrasi secara damai dengan cara merobek baligho besar yang bergambar Presiden Suriah, Bashar al-Assad.<sup>3</sup> Akibat atas aksi itu, polisi pun melakukan tindakan represif terhadap demonstran. Demonstrasi tersebut berlanjut di Ibu Kota Suriah, Damaskus dan lagi tindakan represif dilakukan oleh para polisi sehingga menjatuhkan korban.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Leila Simona Talani. 2014. *The Arab Spring in The Global Political Economy*. New York: Palgrave Mcmillan. Hal. 3

<sup>2</sup> Paul Danahar. 2013. *The New Middle East*. New York: Bloomsbury Press. Hal. 484

<sup>3</sup> "Syrian Troops Open Fire on Protesters in Several Cities", NY Times, <http://www.nytimes.com/2011/03/26/world/middleeast/26syria.html? r=0>. Di akses pada 28/3/2015

<sup>4</sup> "Daraa: The spark that lit the Syrian flame". CNN. <http://edition.cnn.com/2012/03/01/world/meast/syria-crisis-beginnings/>. Diakses pada

Rangkaian tersebut menjadi salah satu pendorong dibentuknya para oposisi yang lebih terstruktur dan memiliki persenjataan. Pada bulan July 2011, Kolonel Riad Al Assad membelot dari angkatan bersenjata Suriah dan membentuk *Free Syrian Army* dengan 10.000 anggotanya yang berpusat komandan di Turki.<sup>5</sup> *Syrian National Council* (SNC) dibentuk pada tanggal 23 Agustus 2011 di Turki yang mengklaim sebagai wakil dari kelompok oposisi yang berada di Suriah, Organisasi ini juga terdiri dari Ikhwanul Muslimin, Kurdistan, dan tokoh-tokoh sekuler.<sup>6</sup> SNC juga melakukan hubungan diplomatik baik negara maupun organisasi internasional. Selanjutnya, *Friends of Syria* berawal dari sebuah forum negara-negara yang mendukung pihak oposisi. Terhitung terdapat lebih dari 100 negara yang berpartisipasi dalam forum ini.<sup>7</sup> Selain FSA, SNC, dan *Friends of Syria* ada juga *Syrian National Coalition for Opposition and Revolutionary Forces* (SNCORF) yang dibentuk di Doha, Qatar. SNCORF ini terbentuk karena SNC dianggap tidak dapat mengendalikan jalannya pemberontakan dan menyatukan para pemberontak yang berada di Suriah.<sup>8</sup> Dan yang terakhir ialah *National Coordination Council* (NCC) yaitu oposisi alternative yang melarang adanya intervensi militer, hasutan agama dan sekte, kekerasan, dan juga militerisasi revolusi ini.<sup>9</sup>

Diluar dari organisasi-organisasi pemberontakan tersebut, permasalahan sekte agama dalam pemberontakan ini juga signifikan. Penduduk Suriah yang mayoritas Sunni, ternyata dipimpin oleh Islam Alawi, yang juga mempunyai hubungan erat dengan Syiah yang notabene adalah minoritas.<sup>10</sup> Posisi Suriah sangatlah strategis untuk Islam Syiah karena menjadi penghubung antar Iraq, Iran, dan Lebanon yang merupakan juga komunitas agama Islam Syiah yang berada di wilayah Timur Tengah. Sehingga negara-negara Islam Sunni yaitu Arab Saudi, Turki, Qatar, dan Kuwait mempunyai ambisi untuk menjungkir balikkan pemerintahan Alawi dan selanjutnya kekuasaan dipegang oleh Islam Sunni sehingga penghubung antar komunitas Islam Syiah tersebut dapat dilemahkan.<sup>11</sup>

Pemberontakan yang terjadi di Suriah tentunya menarik perhatian negara-negara dan juga organisasi-organisasi internasional. Negara-negara yang berada di Timur Tengah yang merupakan dimana Suriah berada, negara-negara Barat yang mempunyai ambisi menegakkan prinsip-prinsip humanitarian,

---

28/3/2015.

<sup>5</sup> Dina Y. Sulaeman. 2013. *Prahara Suriah*. Bandung : Mizan Media Utama. hal. 105

<sup>6</sup> *Ibid*. hal. 105

<sup>7</sup> Paul Danahar. *Loc Cit*. hal. 499

<sup>8</sup> Dina Y. Sulaeman *Loc Cithal*. 116

<sup>9</sup> Faith Olanrewaju, Segun Joshua. "The Diplomatic Dimension of the Syrian Conflict," dalam *Jadavpur Journal of International Relations*. 2015. Sage Publication: New York. hal 48

<sup>10</sup> Mediel Hove. Darlington Mutanda. "The Syrian Conflict 2011 to the Present Challenges and Prospects". dalam *Journal of Asian and African Studies*. 2011. SAGE Publication: New York. hal. 564

<sup>11</sup> *Ibid* hal. 565

negara-negara non Barat seperti Rusia dan China, dan juga PBB yang ingin menjaga stabilitas dunia. Seluruh aktor hubungan internasional mempunyai kepentingan dan visi terhadap masa depan Suriah. Turki dan Rusia adalah sebagian aktor yang mempunyai pengaruh penting terhadap konflik yang terjadi Suriah. bahkan tidak hanya itu, Rusia dan Turki secara terang-terangan saling bertolak belakang, menggunakan angkatan bersenjata, dan membangun aliansi.

### **Sikap dan Kepentingan Rusia**

Politik Luar Negeri Rusia terdiri dari meningkatkan pengaruh dengan cara membangun kerjasama, meningkatkan citra internasional, dan integrasi secara besar antar Rusia dengan dunia dalam hal ekonomi dan juga modernisasi.<sup>12</sup> Sejak terjadinya perang saudara pada Maret 2011 di Suriah, Rusia berusaha untuk melakukan upaya diplomasi baik dengan Suriah, negara-negara Timur Tengah yang dekat dengan Rusia seperti Iran, dan juga di beberapa Organisasi Internasional seperti PBB untuk menyelesaikan konflik ini. Rusia melihat pergerakan negara-negara barat yang mengecam aksi Bashar Al Assad dan mengusahakan untuk menjalankan skenario yang pernah berlangsung di Libya digunakan juga di Suriah. Jika pemerintahan Bashar Al Assad dapat dijatuhkan dan kemudian digantikan dengan Oposisi yang mendapatkan bantuan dari negara-negara Barat, maka posisi Rusia di Timur Tengah akan dibahayakan.

Rusia dan Suriah mempunyai hubungan yang sangat dekat sejak berakhirnya era Perang Dingin. Kepentingan ekonomi dan juga kemitraan ekonomi yang dibayangi oleh kekhawatiran ideologis dan dorongan aliansi. Pada masa jatuhnya Uni Soviet dan Boris Yeltsin naik menjadi Presiden pertama Rusia, bantuan bekas Uni Soviet ini memberhentikan bantuan militer dan juga ekonomi untuk Suriah. Tetapi hubungan Rusia dan Suriah kembali meningkat sejak naiknya lagi Presiden Vladimir Putin pada tahun 2000 dan juga Bashar Al Assad pada tahun 2000.<sup>13</sup>

Pada bulan Juni 2011, oleh Sergei Lavrov sebagai menteri luar negeri Rusia menolak untuk membahas permasalahan Suriah di Dewan Keamanan PBB karena menanggapi bahwa konflik Suriah ini tidak menjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Rusia lebih mengedepankan untuk melalui hubungan diplomasi ke Pemerintahan Suriah secara terlebih dahulu. Rusia menyarankan pemerintah Suriah untuk melakukan pemberhentian terhadap Hukum Darurat Negara, memberhentikan *Supreme State Security Court*, menerima sistem multi partai, melaksanakan pemilihan umum, dan lain-lain, dan juga mengajak negara-negara lain untuk bersabar.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.* hal. 50

<sup>13</sup>*Ibid* hal. 46

<sup>14</sup> Aзуоlas Bagdonas. "Rusia's Interests in the Syrian Conflict: Power, Prestige, and Profit". Dalam *European Journal of Economics and Political Studies Vol. 5*. 2012. Fatih University: Istanbul. Hal.

Hingga bulan September 2011 protes yang terjadi menjadi pemberontakan dan negara-negara Barat mulai menyuarakan agar Bashar Al Assad segera turun dari kepresidenan. Rusia mengharapkan agar Liga Arab untuk melakukan inisiatif terhadap Konflik Suriah ini. Tetapi kekacauan yang terjadi di Mesir membuat internal Liga Arab tidak seimbang dan menjadikan Arab Saudi berpengaruh, sedangkan Arab Saudi mempunyai kepentingan untuk menjatuhkan Rezim Assad yang akan melemahkan kekuatan Iran. Tetapi diatas itu Piagam Liga Arab telah dituliskan *Abstain from any action calculated to change established system of governments*. Oleh karena itu Liga Arab tidak bisa melakukan sesuatu baik itu membantu Rejim yang berlangsung ataukah mendesak untuk menggantinya.<sup>15</sup>

Dalam masa Maret 2011 hingga Juni 2012 posisi Rusia sepenuhnya melindungi Assad dari tekanan international, daripada berkontribusi untuk membuat resolusi untuk konflik pada tataran organisasi international.<sup>16</sup> Bekerja sama dengan China, Rusia telah melakukan tiga kali veto atas hasil rapat PBB, pertama pada Oktober 2011 resolusi ini berisikan sanksi terhadap Suriah yang di usulkan oleh negara Eropa. Kedua, memveto resolusi di Dewan Keamanan PBB yang berisikan agar Assad segera turun dari kepresidenan. Dan terakhir pada bulan yang sama kembali memveto hasil dari Majelis Umum yang mengutuk rejim pemerintahan Suriah.<sup>17</sup>

Rusia menolak dilakukannya intervensi militer asing seperti yang terjadi di Kosovo, Afganistan, Iraq, dan Libya karena intervensi yang dipimpin oleh negara negara barat yang dapat menjadi ancaman terhadap sistem International dan juga menjadi potensi terganggunya kestabilan pemerintahan di Rusia dan juga negara-negara otokratis yang merupakan tetangga dan juga sahabat Rusia.<sup>18</sup> Pengalaman revolusi warna yang terjadi di Georgia, Kirgistan, dan Ukraina dimana kemudian terjadi pergantian rejim merupakan corak dari intervensi-intervensi yang dipimpin oleh negara-negara barat.<sup>19</sup> Revolusi warna yang sebelumnya terjadi di negara-negara Eropa Timur ternyata berlanjut ke negara-negara yang berada di Timur Tengah.

Rusia juga menganggap Amerika Serikat melakukan penggeseran pemimpin negara yang dianggap mempunyai kontradiksi terhadap kepentingan

---

58

<sup>15</sup>*ibid* hal. 59

<sup>16</sup>*Ibid* hal. 60

<sup>17</sup> Mordechai Chaziza. "Soft Balancing Strategy in the Middle East: Chinese and Russian Vetoes in the United Nations Security Council in Syria Crisis". dalam *China Report*. 2014. SAGE Publication : New York. Hal. 247

<sup>18</sup>Samuel Charap. "Rusia, Syria and the Doctrine of Intervention". Dalam *Survival Global Politics and Strategy*. Routledge: London. Hal.36

<sup>19</sup> Samer N Abboud. *Syria*. 2016. Polity Press: Cambridge. Hal. 126

politik luar negeri Amerika Serikat terkhususnya yang beraliansi dengan Iran. Terlebih sejak pidato Barrack Obama pada 18 Agustus 2011 mengatakan Presiden Assad harus turun dan telah menjadi prioritas Amerika Serikat untuk melakukan hal demikian.<sup>20</sup> Pandangan Rusia terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) pun berbeda dengan negara-negara Barat. Rusia masih menggunakan konsep HAM yang digunakan oleh Uni Soviet, dimana negaralah yang menjadi asal-usul dari HAM tersebut oleh karena itu HAM tidak bisa lebih dipentingkan daripada negara itu sendiri.<sup>21</sup> Pengalaman Rusia terhadap intervensi militer yang terjadi di Libya ketika Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi 1973 pada Maret 2011. Walaupun Rusia abstain dalam pemungutan suara tersebut, Rusia ditugaskan hal yang penting dalam penerapan resolusi tersebut. Dalam berjalannya resolusi yang mengizinkan diberlakukannya *no-fly zone* di Libya ternyata pemerintah koalisi tersebut melakukan sesuatu yang lebih dari penerapan *no fly zone*, koalisi ini ternyata berperan aktif dalam menjatuhkan rezim pemerintahan Ghadaffi.<sup>22</sup>

R. Dannreuther, sebagaimana dikutip Abboud, mengatakan *Rusian Idea* merupakan kritik Rusia terhadap intervensi yang dilakukan oleh negara-negara barat. Intervensi-intervensi yang dilakukan dan dipimpin oleh negara-negara barat upaya menyebarkan demokrasi negara-negara barat ke negara-negara non barat.<sup>23</sup> Dan menggunakan intervensi militer yang terlegitimasi merupakan upaya yang dapat memuluskan rencana negara-negara barat tersebut. Suriah adalah salah satu dari sedikitnya aliansi Rusia yang berada di Timur Tengah. Jika President Assad jatuh, maka Rusia akan kehilangan banyak pengaruhnya di wilayah ini. Rusia menginginkan kekuatan dunia menjadi *multipolar* artinya tidak menjadikan hanya satu sisi yang di dominasi oleh Amerika Serikat melainkan Rusia juga menjadi pihak yang berpengaruh.<sup>24</sup>

Untuk menghindari ditetapkannya *No Fly Zone* di Suriah atas mandate Dewan Keamanan PBB, maka Rusia menjanjikan bantuan senjata misil S-300 kepada rejim Assad. Senjata mempunyai jangkauan hingga 200 km dan juga mampu melacak dan mengejar beberapa target secara langsung. Bahkan jangkauan senjata ini sampai wilayah Israel, sehingga membuat Israel membuat persiapan untuk mengantisipasi jika senjata ini digunakan.<sup>25</sup>

Pangkalan angkatan laut Tartus ialah pangkalan yang berada di luar wilayah Rusia dan satu-satunya pangkalan yang berada diluar bekas negara-

---

<sup>20</sup> Samuel Charap. *Op Cit* 37

<sup>21</sup> Azoulas Bagdonas *Op Cit*. hal. 68

<sup>22</sup> Samer N Abboud. *Op Cit*. hal. 127

<sup>23</sup> Samer N Abboud. *Op Cit*. hal.128

<sup>24</sup> Azuolas Bagdonas. *Op Cit*. hal. 67

<sup>25</sup> Meidel Hove. *Op Cit*. hal. 562

negara Uni Soviet.<sup>26</sup> Kerja sama Rusia dan Suriah memberikan kewenangan terhadap Rusia untuk mengelola dan menggunakan pangkalan angkatan laut Tartus. Peran pangkalan angkatan laut Tartus ini sangatlah penting, karena memudahkan kapal perang Rusia untuk mengisi bahan bakar di wilayah mediterranean tanpa harus kembali ke pangkalan Laut Hitam. Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Madya Viktor Chirkov mengatakan "*as long as Russian Navy performs missions in the Gulf of Aden and the Mediterranean Sea, this base is critical for us.*" Untuk saat ini Pangkalan ini mempunyai tiga dok terapung, bengkel terapung, fasilitas gudang, barak, dan juga rumah untuk 50 mekanik. Tahun 2008 kedua negara ini melakukan pembicaraan untuk meningkatkan pangkalan angkatan laut ini menjadi sepenuhnya matang agar bisa digunakan untuk Armada Kapal Laut Hitam dapat dikerahkan.<sup>27</sup> Pangkalan Tartus ini juga menjadi penting karena setelah Revolusi Orange di Ukraina, pangkalan angkatan laut di Sevastopol tidak dapat digunakan lagi oleh Rusia setelah tahun 2017. Rusia dan Suriah telah menandatangani kontrak kerjasama untuk pertempuran pesawat tempur dan menyewakan pangkalan angkatan laut Tartus yang merupakan akses langsung Rusia ke laut Mediteranian.<sup>28</sup>

Kerjasama ekonomi antar Rusia dan Suriah berjumlah sekitar \$20 Juta, yang terdiri dari kontrak militer dan investasi energi.<sup>29</sup> Vladimir Putin mengemukakan fakta dampak terjadinya *Arab Spring*. Beberapa perusahaan Rusia kehilangan pasar dan juga kontrak yang besar setelah dibangun berdekade-dekade. Hubungan ekonomi Rusia dan Suriah telah terbangun dengan baik dan bahkan mendapatkan lompatan sejak tahun 2003. Perdagangan ini umumnya mempunyai fokus kepada kontrak antar pemerintah yang besar, dimana Rusia menyediakan produk minyak dan berbagai macam mesin. Beberapa perusahaan besar yang telah bekerja di Suriah seperti cabang Gazprom yaitu Stroytransgaz yang membangun pipa gas arab pada tahun 2008 sepanjang 319 km dari El Rehab menuju Homs. Dan juga Tatneft yang merupakan perusahaan keenam terbesar minyak mentah yang telah bekerja sama dengan General Petroleum Company untuk mengadakan explorasi dan juga pembangunan minyak sejak tahun 2005.<sup>30</sup>

Perdagangan senjata juga menjadi bagian terpenting dari hubungan Rusia dan Suriah. Rusia mendukung Suriah tidak terlepas dari dampak yang terjadi setelah revolusi di Libya yang mengakibatkan hilangnya pasar Rusia. Dalam kurun waktu 2007-2011, 78% dari seluruh persediaan senjata Suriah bersalkan dari Rusia (17% dari Belarusia dan 5% dari Iran). Perdagangan senjata antar

---

<sup>26</sup> Mordechai Chaziza. *Op Cit.* hal. 250

<sup>27</sup> Azoulas Bagdonas, *Op Cit.* Hal. 61-62

<sup>28</sup> Faith Olenrewaju. *Op Cit.* Hal. 50

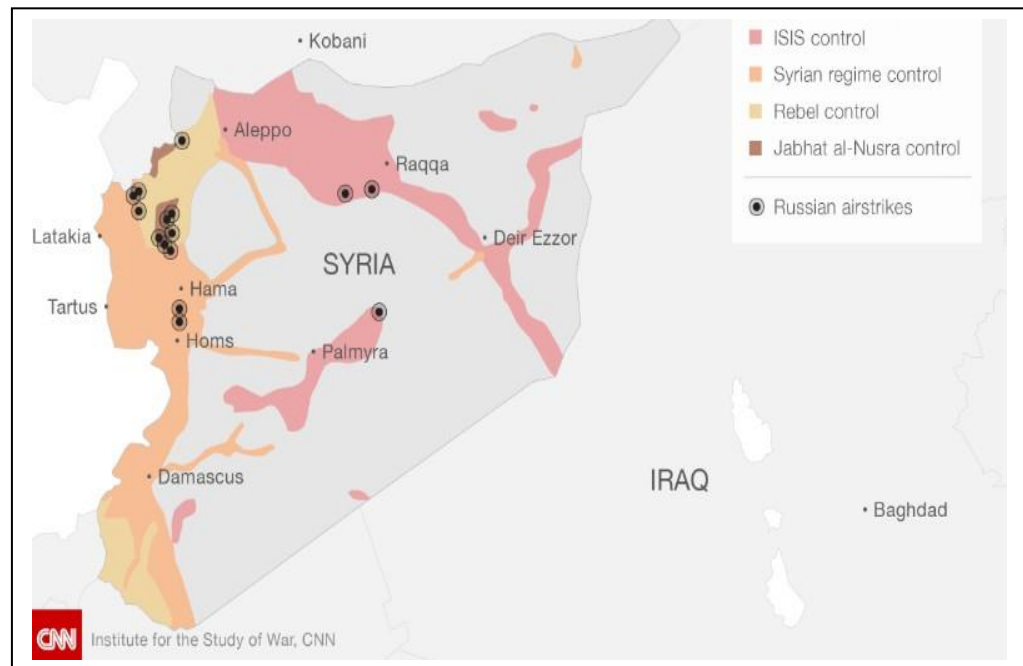
<sup>29</sup> Mordechai Chaziza. *Op Cit.* hal. 250

<sup>30</sup> Azoulas Bagdonas. *Op Cit.* Hal. 63-64

Rusia dan Suriah juga menyumbangkan 0.81% dari total keseluruhan perdagangan senjata seluruh dunia pada tahun 2007-2011.<sup>31</sup> Karena kontrak perekonomian antar kedua negara ini sangat lah besar maka ketika rejim pemerintahan berubah Rusia akan tidak mendapatkan keuntungan yang seperti sebelumnya atau bahkan akan kehilangan pasar. Suriah juga mempunyai utang kontrak dengan perusahaan militer Rusia dengan estimasi sebanyak \$4 Milyar.<sup>32</sup>

Rusia mendongkrak bantuannya ke rejim Assad sejak akhir September 2015. Rusia mengirimkan 50 pesawat tempur, 2000 marinir, telah dikirim ke Suriah.<sup>33</sup> Bantuan dari Rusia ini kemudian membuat, pemerintah yang bersifat bertahan berubah menjadi penyerang. Sebelumnya pemerintah melakukan *vis a vis* secara bertahan dengan para pemberontak.<sup>34</sup>

**Gambar 1. Serangan udara yang dilakukan oleh Rusia pada 30 September sampai 5 Oktober 2015**



Sumber: <http://edition.cnn.com/2015/10/12/world/syria-rusia-airstrikes/>

Walaupun Rusia mempunyai pandangan yang berbeda dengan negara-negara Timur Tengah dan juga negara-negara Barat terhadap bagaimana menangani masalah pemberontakan Suriah ini, tetapi menangani ISIS, Rusia dan

<sup>31</sup>Ibid 64-65

<sup>32</sup> Samer N Abboud. *Op Cit.* 129

<sup>33</sup> "As Rusia Returns to Middle East, a Look at Some of Its Weapons" NY Times. [http://www.nytimes.com/2015/10/03/world/middleeast/as-rusia-returns-to-middle-east-a-look-at-some-of-its-weapons.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2015/10/03/world/middleeast/as-rusia-returns-to-middle-east-a-look-at-some-of-its-weapons.html?_r=0). Diakses pada 24 Mei 2016

<sup>34</sup> Fairfax Mark N. Katz. "Rusian Intervention in the Syrian Civil War". Dalam *Rusian Analytical Digest No. 175*. 2015. ETH Zurich: Zurich. Hal. 3



negara-negara tersebut tetap mempunyai kepentingan yang sama. Tetapi serangan-serangan yang dilakukan Rusia tidak hanya ISIS, melainkan oposisi yang menerima bantuan dari Turki, Arab Saudi, dan Qatar. Bahkan menurut laporan serangan yang dilakukan oleh Rusia lebih banyak ke pihak pemberontak dibandingkan ISIS itu sendiri. Akhirnya komunitas internasional mempunyai pandangan bahwa kehadiran Rusia dalam memerangi ISIS tidak akan berpengaruh akan kehadiran ISIS.<sup>35</sup> Pada akhir September 2015 Rusia, Iran, Iraq, dan Suriah mendeklarasikan koalisi mereka untuk melawan ISIS. Pusat pertukaran informasi dan intelejen ini bertempat di Baghdad, Iraq. Pusat informasi ini dijadikan tempat koordinasi anti-ISIS.<sup>36</sup> Hadirnya koalisi ini diapresiasi oleh pemerintahan Suriah dimana negara-negara yang termasuk dalam koalisi ini dinilai sebagai negara yang menghormati kedaulatan negara Suriah. Diharapkan juga koalisi ini untuk lebih progresif ketimbang aliansi anti-ISIS yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Setelah dibentuknya koalisi ini Duta Besar Suriah untuk Rusia, Riyad Haddad mengatakan bahwa kehadiran militer Rusia memang diinginkan oleh pemerintah Suriah. Dengan begitu Rusia menghormati kedaulatan Suriah sesuai dengan hukum internasional dan piagam PBB. Bahkan aliansi anti-terorisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat dibentuk satu tahun lalu tidak berpengaruh tetapi semakin banyak wilayah yang dikuasai dan juga anggotanya.<sup>37</sup>

Dalam koalisi ini Iran menugaskan pasukannya sebanyak 2000 hingga 3000 orang untuk membantu militer Suriah untuk melawan ISIS. Namun pasukan tersebut tidak hanya ditugaskan untuk melakukan membantu militer Suriah tetapi menjaga agar jalur Iran ke Lebanon juga aman.<sup>38</sup> Koalisi ini pun semakin besar dengan hadirnya Hezbollah sehingga koalisi ini menjadi Koalisi 4+1, dimana Rusia, Suriah, Iran, Iraq dan Lebanon.<sup>39</sup>

### **Sikap dan Kepentingan Turki**

Hubungan Turki dan Suriah telah melewati beberapa tahap sebelum tahun 2011, yaitu: *westrenism*/anti-komunis, anti terorisme, dan kerja sama. Pada awal tahun 2000, Turki melakukan kerja sama keamanan menyuluruh

---

<sup>35</sup>*Ibid.* hal. 3-4

<sup>36</sup> "Rusia, Iran, Iraq, & Syria setting up joint information center to coordinate anti-ISIS operations". RT. <https://www.rt.com/news/316592-rusia-syria-islamic-state/> Diakses pada 24 Mei 2016

<sup>37</sup> "Syria's Ambassador to Rusia Urges All Countries to Join Syria and Rusia Against Terrorism". Syrian Arab News Agency. <http://sana.sy/en/?p=56454>. Di akses pada 24 Mei 2016

<sup>38</sup> "Iran boost support to Syria" Telegraph. <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/10654144/Iran-boosts-support-to-Syria.html>. Diakses pada 24 Mei 2016

<sup>39</sup> "Hezbollah joins Rusia, Iran, Syria and Iraq in '4+1 Alliance'". War in Context. <http://warincontext.org/2015/09/27/hezbollah-joins-rusia-iran-syria-and-iraq-in-41-alliance/>. Diakses pada 24 Mei 2016

bersama Hafez Al Assad dan kemudian dikembangkan lagi ke sektor perekonomian ketika Bashar Al Assad menduduki jabatan kepresidenan. Turki berusaha untuk bekerja sama serta mendekatkan dirinya kepada negara-negara tetangganya untuk meningkatkan *soft power* Turki itu sendiri. Turki juga sudah menghilangkan kebijakan visa dan penghapusan bea cukai. Tidak hanya itu, pada tahun 2008 Turki berusaha untuk memediasi konflik antar Suriah dan Israel. Usaha-usaha diplomasi yang dilakukan oleh Turki ini merupakan manifestasi dari politik luar negeri yaitu *zero problems*.<sup>40</sup> Kebijakan *zero problems* ini ialah diskursus PM Erdogan dan Menteri Luar Negeri Davutoglu yang mengelompokkan bangsa Turki, Arab, dan Kurdi dibawah satu bendera Islam setelah Perang Dunia I. Kebijakan ini diharapkan didorong dengan mengurangnya kekhawatiran keamanan, dan ambisi untuk mengeksport perdamaian liberal ke wilayah ini terutama melalui integrasi ekonomi.<sup>41</sup>

Hal ini tidak terlepas dari partai yang sedang berkuasa yaitu *Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP)* partai presiden yang sedang berkuasa yaitu Presiden Recep Tayyip Erdogan. Sejak Suriah menjadi ajang memamerkan kebijakan di Timur Tengah, Turki pun mengambil peran dalam konflik ini. Sejak dimulainya pemberontakan di Suriah, Erdogan mengusulkan agar rejim pemerintahan berlangsung untuk melakukan kebijakan yang jauh mencapai reformasi politik daripada melakukan tindak represif ke masyarakat yang berdemonstrasi. Tetapi ketika saran ini tidak diterima, Erdogan merasa tersinggung dan kemudian sifat Turki ke Suriah berubah menjadi permusuhan. Kerja sama *High Level Strategic Council* dibubarkan yang sebelumnya dibuat untuk bekerjasama menanggulangi masalah-masalah keamanan seperti air dan dicabutnya sanksi ekonomi dengan menyelesaikan perdagangan bebas yang sebenarnya lebih menguntungkan Turki.<sup>42</sup>

Agustus 2011, ketika Assad menolak untuk melakukan gencatan senjata dan melakukan dialog bersama oposisi serta melaksanakan hasil dialognya, para elit Turki secara tegas menginginkan agar Rejim tersebut diganti dan kemudian diganti dengan Ikhawanul Muslimin (IM) Suriah seperti yang terjadi di Mesir. Untuk memmanifestasikan gagasan ini, maka Turki memberikan pusat dan juga dukungan kepada FSA yang beraliansi dengan IM dalam SNC. Akhir tahun 2012 aktifitas FSA untuk menjatuhkan rejim Assad mulai menurun. Turki dengan berani memberikan FSA kewenangan untuk mengatur dan merekrut dalam negara Turki. Kebijakan ini tentunya tidak hanya menyelesaikan konflik yang

---

<sup>40</sup> Ozlem Demirtas Bagdonas. "Reading Turkey's foreign policy on Syria: The AKP's construction of a great power identity and the politics of grandeur".dalam *Turkish Studies vol. 15*. 2014. Routledge: London. Hal. 2

<sup>41</sup> Raymond Hinnebusch. "Back to Enmity: Turkey-Syria Relations Since the Syrian Uprising". Dalam *Journal of German Orient Institute vol 56*. St Andrews University: Scotlandia. Hal. 3

<sup>42</sup>*Ibid.* hal. 1

sedang berlangsung, tetapi juga membuka jalan pemerintahan yang demokratis di Suriah.<sup>43</sup>

Tidak sabar akan hal yang dilakukan kepada masyarakatnya, Turki melakukan diplomasi baik ke negara-negara ataupun organisasi internasional. Dalam kanca International seperti PBB dan NATO Turki juga berkali-kali mengusulkan agar dilakukannya *No Fly Zone* di utara Suriah. Dan juga melakukan sanksi unilateral, membekukan aset-aset Suriah untuk membatalkan pembelian dan penjualan senjata militer.<sup>44</sup> Mulanya Turki tidak sepakat dengan dilakukannya intervensi asing, jika memang harus dilakukan artinya tidak ada jalan lain.

Dalam *Gulf Cooperation Council* (GCC), Turki bersama Arab Saudi mulai mendukung oposisi. Tidak hanya bantuan-bantuan politik melainkan bantuan akan senjata dan juga *safe haven* di wilayah Turki. Suriah kemudian meminta dan bergantung bantuan kepada Iran, Iraq, dan Hezbollah untuk bertahan. Skenario ini kemudian membuat konflik antar Sunni dan Siah menjadi lebih jelas. Kelompok negara-negara Islam Sunni menganggap bahwa jika Suriah jatuh ke tangan masyarakat Islam Sunni dimana yang masyarakatnya memang mayoritas, maka hubungan antar Hezbollah dan Iran-Iraq akan terputus. Terputusnya hubungan itu akan sangat melemahkan posisi Islam Siah di wilayah Timur Tengah.<sup>45</sup>

Turki menginginkan perannya di Timur Tengah lebih signifikan lagi, bahkan menjadi negara di Timur Tengah yang mengeksport demokratisasi ke negara-negara yang berada di wilayah tersebut. Turki mempunyai ambisi *Neo-Ottoman* dimana Turki ingin menjadi pemimpin di dunia Arab. *Neo Ottoman* ini diperkenalkan oleh PM Erdogan dan kemudian Menteri Luar Negeri Davutoglu yang ingin mengelompokkan Turki, Arab, dan Kurdish di bawah satu bendera Islam yang terbagi-bagi setelah Perang Dunia II<sup>46</sup>. Omer Taspinar dalam *Turkey's Strategic Vision and Syria* menjelaskan bahwa *Neo Ottoman* ialah:

*"In this Neo-Ottoman paradigm, Ankara exerts more soft power – political, economic, diplomatic, and cultural influence – in formerly Ottoman territories such as the Middle East, North Africa, and the Balkans, as well as in other regions where Turkey has strategic and national interests. This broad vision for Turkish foreign policy requires embracing the Ottoman great power legacy, and most importantly it calls for a redefinition of Turkey's strategic and national identity."*<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> Ozlem Demirtas Bagdonas. *Op Cit* hal. 3

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Raymond Hinnebusch., *Op Cit* hal. 4

<sup>46</sup> Ozlem Demirtas Bagdonas, *Op Cit.* hal 3

<sup>47</sup> Omer Taspinar. "Turkey's Strategic Vision and Syria". Dalam *The Washington Quarterly* Vol. 35.

Dalam paradig *Neo-Ottoman* ini, Ankara menggunakan lebih banyak *soft power* seperti politik, ekonomi, diplomasi, dan pengaruh-pengaruh budaya di wilayah bekas Ottoman seperti Timur Tenga, Afrika Utara, dan Balkans, dan juga wilayah lain dimana Turki mempunyai strategi dan kepentingan national. Visi yang luas dari politik luar negeri ini membutuhkan rangkulan terhadap warisan Ottoman, dan lebih penting lagi yakni panggilan untuk meredefinisi strategi dan identitas national Turki

Ketika pemberontakan di Suriah terjadi dan usulan Turki kepada pemerintah Suriah di tolak, Turki hanya mempunyai pilihan lain, apakah tetap mendukung Presiden Assad atau kah mendukung oposisinya. Karena Turki ingin dilihat serius perannya di wilayah Timur Tengah ini, maka lebih memilih untuk berada di pihak oposisi. Menghancurkan hubungan diplomasi dengan Suriah artinya kebijakan *zero problems* tidak dapat dijalankan lagi tanpa tergantungnya rejim pemerintahan Suriah.<sup>48</sup>

Turki dan Amerika Serikat menyepakati perjanjian rahasia pada awal tahun 2012 dimana *Central Intelgence America* (CIA) mengirimkan senjata-senjata yang berada di gudang Libya ke pemberontak di Suriah. Tapi Amerika Serikat menghentikan program tersebut setelah senjata-senjata itu rupanya jatuh ke militant jihad. Turki kemudian diketahui membantu kelompok jihad yang mempunyai hubungan dengan Al-Qaeda karena kelompok tersebut dinilai paling efektif untuk mengalahkan rejim Assad juga dinilai dapat melawan rejim anti-sunni seperti Iraq, Iran, dan Suriah. Pada musim panas 2014 secara hebat melawan untuk menjatuhkan pemerintahan Assad. Ketika akhirnya pemerintahan Assad jatuh para elit Turki berargumen bahwa ISIS akan perlahan menghilang dan oposisi moderat akan menududuki pemerintahan dan yang diharapkan ialah IM, dan kemudian melihat Turki untuk membangun kembali demokratisasi Suriah.<sup>49</sup>

Turki telah memfasilitasi ISIS dengan pelatihan, senjata, dan juga memberikan izin para kelompok jihad untuk dengan bebas melewati perbatasan, memberikan kewenangan akan dua pos perbatasan yang sangat penting untuk melakukan rekrutmen. Tidak hanya itu Turki juga mengizinkan ISIS untuk menjual minyak mentah Suriah melalui Turki dan sebanyak \$100 juta diperkirakan ada di Bank Turki. Tetapi karena ditekan oleh Amerika Serikat untuk menghentikan bantuan tersebut kepada ISIS, Turki menutup dua pos perbatasan yang diberikan tetapi masih tetap mendukung kelompok Jahbat al-Nusrah dan Aharar al-Sham.<sup>50</sup>

Turki tidak dapat melakukan intervensi secara langsung. Tetapi

---

2012. Routledge: London. Hal 128

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup> Raymond Hinnebusch *Op Cit.* hal. 5

<sup>50</sup>*Ibid.* hal. 5

penyebaran militer di perbatasan terus dilaksanakan, penembakan artileri Turki ke wilayah dalam Suriah juga sangat sering entah untuk mendukung para pemberontak atau menekan penyebarluasan PYD yang telah dikuasai. Jenderal Necdet Ozrel sebagai Kepala Staff Tentara Turki menolak kebijakan Erdogan untuk melakukan intervensi militer. Jenderal Ozrel kemudian pensiogjn pada Agustus 2015 dan digantikan oleh Jenderal Huluski Akar dan tetap tidak mempunyai niat untuk melakukan mobilisasi militer ke wilayah Suriah. Para Jenderal ini memproyeksikan banyaknya korban dan menemukan kesulitan untuk mencari jalan keluar dari Suriah karena, pihak pertahanan udara Suriah dengan mudah akan menyerang jalur persediaan pasukan Turki nantinya.<sup>51</sup>

Keberadaan Kurdish dalam kondisi pemberontakan yang ada di Suriah juga menambah pelik permasalahan baik pemberontakan yang sedang berlangsung, maupun hubungan Turki dan Suriah. Bangsa Kurdish sudah berada sebelum Turki terbentuk. Dalam perjalanannya bangsa Kurdish ini kemudian terbagi ke dalam berbagai wilayah negara yakni, Turki, Iran, Iraq, dan Suriah. Sejak tahun 1978 Abdullah Occalan membentuk *Partiya Karkeren Kurdistan* (PKK) di Turki untuk membentuk negara sosialis di wilayah yang diduduki bangsa Kurdish yakni Turki, Suriah, Iraq, dan Iran<sup>52</sup>. Kehadiran PKK kemudian memberi ancaman tersendiri kepada Turki.

Bangsa Kurdish yang berada di Suriah pun membentuk semua organisasi yang baru yang juga merupakan bagian atau cabang dari PKK yang berada di Turki yakni *Partiya Yekitiya Demokrat* (PYD) atau Democratic Union Party pada tahun 2003<sup>53</sup>. Walaupun PYD merupakan hasil bentukan PKK tetapi bangsa Kurdish yang berada di wilayah Suriah tidak ingin memerdekakan wilayahnya tetapi menginginkan hak yang lebih dibandingkan kondisi yang berlangsung sekarang ini.

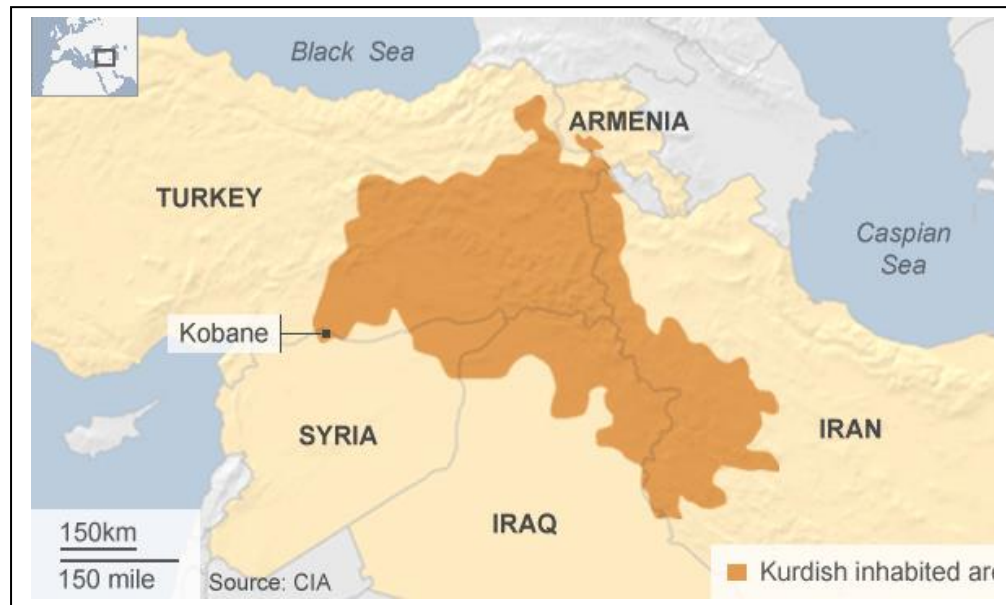
---

<sup>51</sup> International Institute for Strategic Studies. 2016. "Turkey's diminishing policy options Syria". Dalam *Strategic Comments Vol. 22 Issue 2*. United Kingdom: Routledge. hal 2

<sup>52</sup> Reese Erlich. 2014. *Inside Syria: The Backstory of Their Civil War and What the World can Expect*. New York: Prometheus Books.. hal. 173

<sup>53</sup>*Ibid* 175

**Gambar 3.2 Wilayah yang ditinggali oleh Kurdish**



(Sumber: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29702440>)

Beberapa tuntutan yang diinginkan oleh bangsa Kurdish yang berada di Suriah ialah pertama mempunyai hak yang sama dengan warga Suriah termasuk pekerjaan di pemerintahan, passports, asuransi kesehatan, dan juga pendidikan tinggi. Kedua bangsa Kurdish berhak untuk belajar dengan Bahasa Kurdish. Ketiga, konstitusi yang baru harus mengakui bahwa Kurdish merupakan bangsa yang berbeda. Keempat, nama resmi negara harus diganti dari Republic Arab Suriah menjadi Republic Suriah untuk mencerminkan fakta bahwa Suriah merupakan negara dari beberapa bangsa tidak hanya bangsa Arab. Kelima, Kurdish menginginkan untuk mempunyai kewenangan tersendiri diwilayahnya seperti desentralisasi atau otonomi<sup>54</sup>. Hal ini dilihat oleh Turki sebagai upaya Suriah untuk meningkatkan dukungan atas rejim yang ditukar dengan hak kewarganegaraan dan hak katas budayanya<sup>55</sup>.

Namun bangsa Kurdish kemudian berganti arah setelah dibunuhnya Mashaal Tammo pada tanggal 7 Oktober 2011. Mashal Tammo ialah sosok bangsa Kurdish yang berperan penting dalam pemberontakan Suriah. Tammo adalah bagian eksekutif SNC yang terus memperjuangkan agar bangsa Kurdish kemudian masuk dalam bagian Suriah<sup>56</sup>. Kematian Tammo membuat popularitas partai tradisional menurun dan semakin radikal hingga menginginkan agar rejim Assad diturunkan.

<sup>54</sup> ibid 179

<sup>55</sup> Ozlem Demirtas Bagdonas, *Op cit.* hal. 3

<sup>56</sup> Reese Erlich *Op cit.* hal 183

Usaha-usaha merebutkan wilayah oleh PYD dimulai pada tahun 2011. Perebutan wilayah pertama kali ialah Rojova, wilayah Kurdish di bagian utara Suriah. Kemudian di tahun 2012 merebut 4 kota yang berdekatan dengan perbatasan Suriah dan Turki juga District Kurdish yang berada di kota Aleppo. Mereka menaikkan bendera PYD dan bendera Kurdish dibawahnya pada setiap kota yang dikuasai oleh PYD<sup>57</sup>.

Pemerintahan Turki dan Suriah kemudian sangat khawatir akan PYD yang mendapatkan wilayah di Suriah. Militer Turki takut bila Kurdish mendapatkan wilayah dan kemudian mengumumkan kemerdekaan secara *de facto* di bagian utara Suriah dan menjalin hubungan dengan PKK. Oleh karena itu sejak awal tahun 2012, Turki dan pemberontak Suriah mulai untuk mendiskreditkan posisi PYD dengan tuduhan PYD dan PKK mendukung Assad dan mempunyai kesepakatan untuk merebut wilayah Kurdish yang berada di Turki untuk menyerang Turki<sup>58</sup>. Dan pada 2014, Kurdish mengumumkan otonominya pada tiga wilayah yang berada di utara Suriah<sup>59</sup>.

Ancaman baik dari PYD dan PKK membuat pemerintah Turki semakin khawatir. Didudukinya Rojova oleh PYD di khawatirkan akan menginspirasi PKK untuk melakukan pemberontakan<sup>60</sup>. Kehadiran Kurdish dalam pemberontakan Suriah tentunya membuat semakin terpuruk. Dalam survey yang dilakukan ancaman dari ISIS dan PKK hampir terbagi secara rata menurut warga Turki yakni ISIS sebanyak 42% dan PKK sebanyak 44%<sup>61</sup>.

### **Rivalitas Hard Balancing Rusia-Turki**

Persaingan antar Rusia dan Turki merupakan *Hard Balancing*, sesuai dengan yang dikatakan oleh T.V. Paul dalam bukunya *Balance of Power Theory and Practice in 21th Century*. Bahwa *Hard Balancing* ialah usaha atau strategi yang dilakukan oleh suatu negara yang berada dalam kondisi persaingan yang intense dengan negara lain. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan kemampuan militer dan juga membuat aliansi formal.<sup>62</sup>

Rivalitas antar Rusia dan Turki dapat dilihat dari masing-masing perannya dalam forum international dan juga bantuan-bantuan yang diberikan. Rusia sebagai pihak yang ingin melanggengkan rejim Assad dan Turki yang ingin menurunkan rejim sangatlah bertolak belakang, oleh karena itu masing-masing negara mempunyai cara untuk mencapai tujuannya. Rusia sendiri menghadirkan militernya dalam membantu Suriah, walaupun Rusia mengatakan bahwa motif

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> *ibid*

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> International Institute for Strategic Studies *Op Cit.* hal. 3

<sup>61</sup> Ozlem Demirtas Bagdonas. *Op Cit* hal. 7

<sup>62</sup> T.V. Paul, James J. Writz, and Michael Fortman, 2004. *Balance of Power Theory and Practice in 21th Century*. Stanford: Stanford University Press. Hal. 2-3

masuknya militer Rusia di Suriah untuk memerangi ISIS tetapi operasi udara yang dilakukan oleh Rusia lebih banyak menyerang wilayah pemberontak di bandingkan dengan wilayah ISIS itu sendiri. Pemberontak yang diserang oleh Rusia pun pemberontak yang didukung oleh Turki, bahkan Turki membantu dengan pemberian senjata dan dengan membeli minyak dari pemberontak tersebut.

Dalam kanca internasional Rusia dan Turki saling bersaing untuk menggalang dukungan baik untuk menjatuhkan atau mempertahankan Assad. Melalui hubungan bilateral, Rusia mendekati China untuk bersama-sama melakukan Veto terhadap resolusi yang disepakati. Dengan Suriah memberikan saran untuk melakukan reformasi pemerintahan atas tuntutan dari oposisi. Rusia dan Turki masing-masing melakukan hubungan diplomasi pada organisasi-organisasi internasional seperti PBB dimana Rusia mengatakan bahwa posisi Suriah belum sampai pada tingkatan dimana harus dilakukan intervensi melainkan harus mendukung pemerintahan Assad untuk menyelesaikan permasalahan internalnya. Sedangkan Turki memberikan tanggapannya di PBB bahwa rejim Assad harus segera diturunkan karena telah melakukan kejahatan kemanusiaan pada rakyatnya sendiri. Turki bahkan menginginkan agar Suriah segera diberikan sanksi embargo dan dilakukan intervensi juga pelaksanaan *No Fly Zone*.

Dalam tingkat regional pun Rusia dan Turki menggunakan organisasi regional yang ada. Upaya Rusia agar Liga Arab lebih aktif lagi dalam berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik Suriah tidak dapat diharapkan lagi karena adanya peraturan dalam Piagam Liga Arab untuk tidak ikut campur dalam masalah internal masing-masing negara. Walaupun Liga Arab bisa melakukan sesuatu terhadap konflik yang terjadi di Suriah, Liga Arab akan lebih dipengaruhi oleh Arab Saudi dan Turki dalam menyelesaikan konflik ini. Oleh karena itu Rusia membangun koalisi baru pada September 2015 yaitu Koalisi Rusia, Iran, Iraq, dan Suriah kemudian Lebanon untuk melawan ISIS.

Koalisi 4+1 ini merupakan aliansi Rusia yang bisa digunakan oleh Rusia untuk menandingi aliansi anti terorisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk menyerang ISIS. Namun peran Iran menambahkan pasukannya sebanyak 2000-3000 yang ditugaskan menjaga jalur penghubung Iran dan Lebanon membuat Koalisi ini seperti aliansi negara-negara Islam Siah dan Rusia yang ingin membantu mempertahankan rejim Assad. Berbeda dengan GCC yang digunakan oleh Turki. GCC bahkan tidak hanya melalui bantuan-bantuan politik, bantuan yang diberikan oleh GCC untuk para pemberontak berupa senjata dan *safe haven*.

Rusia dan Turki saling bersaing untuk mewujudkan tujuannya masing-masing. Sayangnya upaya Rusia yang tidak dapat ditandingi oleh Turki ialah bantuan militer. Walaupun Turki membantu para pemberontak dan ISIS dengan



memberikan fasilitas, bantuan persenjataan, dan pelatihan, tentu berbeda ketika angkatan bersenjata dari negara yang langsung turun ke dalam medan konflik. Rusia mengerahkan pasukannya untuk membantu pemerintahan dengan sangat tegas. Bentuk rivalitas Rusia dan Turki dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 1. Bentuk Rivalitas Rusia dan Turki**

<b>Bentuk Rivalitas</b>	<b>Rusia</b>	<b>Turki</b>
PBB	Melakukan Veto Terhadap 3 resolusi PBB	Mengusulkan agar PBB menginisiasi <i>No Fly Zone</i> dan sanksi terhadap Suriah
Aliansi Regional	Membuat Koalisi 4+1	Bekerja sama dengan GCC
Bantuan	Memberikan Persenjataan Terhadap pemerintah dan melakukan operasi serangan udara	Memberikan Persenjataan dan Fasilitas untuk Pemberontak dan ISIS

Hubungan antar Rusia dan Turki lebih menyerupai *Hard Balancing* dibandingkan *Soft Balancing* yang menurut T.V. Paul, merupakan pembangunan aliansi secara diam-diam seperti peningkatan persenjataan terbatas, latihan gabungan sementara, atau berkolaborasi dalam institusi regional atau global. Dalam *Soft Balancing* tidak ada persaingan atau peningkatan persenjataan yang intens. Oleh karena itulah persaingan antar Rusia dan Turki lebih menyerupai *Hard Balancing* dibandingkan *Soft Balancing*. Turki mempunyai kelemahan dengan berbatasan luas dengan Suriah, sehingga dampak yang akan diterima oleh militer Turki ketika harus berkonfrontasi dengan Suriah akan lebih besar dibandingkan ketika tidak luas seperti dikerahkannya militer Turki di Iraq. berbeda dengan Rusia yang berada dipihak pemerintah sehingga tidak akan mendapatkan serangan dari pihak rejim dan hanya akan fokus untuk melakukan penyerangan terhadap pemberontak.

Persaingan yang terjadi antar Rusia dan Turki merupakan *Hard Balancing* dimana artinya menurut T.V. Paul ialah strategi yang dilakukan oleh suatu negara yang berada dalam persaingan yang intens bersama negara lain. Negara yang bersaing kemudian akan meningkatkan kemampuannya dan juga membuat aliansi yang formal untuk menyibaldi lawannya. Dalam hal ini Rusia memberikan Suriah bantuan militer berupa 50 pesawat jet, 2000 personil militer, dan sebuah jet S-300 anti misil; operasi serangan udara pada bulan September-Oktober 2015; serta membangun aliansi 4+1 yang anggotanya ialah Suriah, Iran, Iraq, Rusia, dan Lebanon secara terbuka. Sedangkan Turki

memberikan bantuan terhadap ISIS dan Pemberontak berupa fasilitas pelatihan dan persenjataan; akses keluar-masuk perbatasan Turki-Suriah; mengizinkan membuka fasilitas atau *headquarter* SNC, SNCORF yang dimana oposisi Suriah dan menjadi tuan rumah untuk *Friends of Syria* yaitu solidaritas negara-negara yang mendukung oposisi; dan bekerja sama dengan GCC untuk mendukung rejim Assad untuk segera lengser dari jabatannya dan digantikan oleh penduduk Islam Sunni yang memang mayoritas mempunyai posisi sebagai pemberontak.

## **PENUTUP**

Konflik Suriah yang telah berlangsung selama lebih dari setengah dekade merupakan imbas dari gerakan demokratisasi dan restrukturisasi politik regional di Timur Tengah yang dikenal dengan istilah *Arab Spring*. Perkembangan konflik ini telah melibatkan aktor-aktor eksternal yang memiliki kepentingan-kepentingan berbeda dalam masalah Suriah, di antaranya adalah Rusia dan Turki. Kehadiran Rusia dan Turki dalam konflik Suriah terwujud dalam bentuk rivalitas *hard balancing*, di mana kedua negara mendukung pihak berbeda berdasarkan kepentingan yang berbeda. Rusia memberikan dukungan politik dan militer kepada rezim Bashar al Assad untuk menjaga kepentingan pengaruh politik dan ekonominya di kawasan Timur Tengah, sementara Turki memberikan dukungan kepada pihak pemberontak etnis Turki di perbatasan Suriah-Turki. Perbedaan kepentingan tersebut melahirkan rivalitas dalam bentuk *hard balancing* di mana Rusia dan Turki berada dalam kondisi persaingan yang intens secara militer dan aliansi formal. Rivalitas *hard balancing* ini mengakibatkan konflik Suriah semakin kompleks dan berlarut-larut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abboud, Samer N. 2016 *Syria*. Cambridge: Polity Press
- Erich, R. 2014. *Inside of Syria: Backstory of Their Civil War and What The World Can Expect*. New York: Prometheus Books
- Danahar, Paul. 2013. *The New Middle East*. New York: Bloomsbury
- Loretta, Napoleoni, 2014. *Islamist Phoenix*. New York: Seven Stories Press
- Sulaeman, D. Y. 2013. *Prahara Suriah*. Bandung: Mizan.
- Talani, Leila Simona. 2014. *The Arab Spring in The Global Political Economy*. New York: Palgrave Mcmillan
- T.V. Paul, James J. Writz, and Michael Fortman, 2004. *Balance of Power Theory and Practice in 21th Century*. Stanford: Stanford University Press
- Vijay Prashad. 2012. *Arab Spring, Libyan Winter*. Oakland: AK Press & Distribution

### JURNAL

- Bagdonas, Azuolas. 2012 "Russia's Interests in the Syrian Conflict: Power, Prestige, and Profit". Dalam *European Journal of Economics and Political Studies Vol. 5*. Istandbul: Fatih University.
- Bagdonas, Ozlem Demirtas. 2014 "Reading Turkey's foreign policy on Syria: The AKP's construction of a great power identity and the politics of grandeur".dalam *Turkish Studies vol. 15*.London: Routledge.
- Charap, Samuel. 2013. "Russia, Syria and the Doctorine of Intervention". Dalam *Survival Global Politics and Strategy*. London: Routledge.
- Chaziza, Mordechai. 2014. "Soft Balancing Strategy in the Middle East: Chinese and Russian Vetoes in the United Nations Securiy Council in Syria Crisis". dalam *China Report*.New York: SAGE Publication.
- Hinnebusch, Raymond. 2014. "Back to Enmity: Turkey-Syria Relations Since the Syrian Uprising". Dalam *Journal of German Orient Institute vol 56*. Scotlandia: St Andrews University
- Hove, Mediel. Mutanda, Darlington. 2011 "The Syrian Conflict 2011 to the Present Challenges and Prospects". dalam *Journal of Asian and African Studies*.New York: SAGE Publication
- International Institute for Strategic Studies. 2016. "Turkey's diminishing policy options Syria". Dalam *Strategic Comments Vol. 22 Issue 2*. United Kingdom: Routledge.
- Olanrewaju, Faith. Joshua, Segun. 2015 "The Diplomatic Dimension of the Syrian Conflict," dalam *Jadavpur Journal of International Relations*.New York Sage Publication
- Taspinar, Omer.2012. "Turkey's Strategic Vision and Syria". Dalam *The Washington Quarterly Vol. 35*London:.. Routledge

## SITUS

- BBC* "Who are the Kurds?", <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29702440>. Diakses pada 30/2/2016
- CNN* "Daraa: The spark that lit the Syrian flame".. <http://edition.cnn.com/2012/03/01/world/meast/syria-crisis-beginnings/>. Diakses pada 28/3/2015.
- CNN* "Putin: Russian airstrikes in Syria aimed at helping al-Assad regime", <http://edition.cnn.com/2015/10/12/world/syria-russia-airstrikes/>. Diakses pada 30/2/2016
- NY TIMES*. "Syrian Troops Open Fire on Protesters in Several Cities", [http://www.nytimes.com/2011/03/26/world/middleeast/26syria.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2011/03/26/world/middleeast/26syria.html?_r=0). Di akses pada 28/3/2015
- NY TIMES* "As Russia Returns to Middle East, a Look at Some of Its Weapons" *NY Times*. [http://www.nytimes.com/2015/10/03/world/middleeast/as-russia-returns-to-middle-east-a-look-at-some-of-its-weapons.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2015/10/03/world/middleeast/as-russia-returns-to-middle-east-a-look-at-some-of-its-weapons.html?_r=0). Diakses pada 24 Mei 2016
- RT*. "Russia, Iran, Iraq, & Syria setting up joint information center to coordinate anti-ISIS operations". Diakses pada 24 Mei 2016 diakses di <https://www.rt.com/news/316592-russia-syria-islamic-state/>
- Syrian Arab News Agency* "Syria's Ambassador to Russia Urges All Countries to Join Syria and Russia Against Terrorism". *Syrian Arab News Agency*. <http://sana.sy/en/?p=56454>. Di akses pada 24 Mei 2016
- Telegraph* "Iran boost support to Syria" *Telegraph*. <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/10654144/Iran-boosts-support-to-Syria.html>. Diakses pada 24 Mei 2016
- War in Context* "Hezbollah joins Russia, Iran, Syria and Iraq in '4+1 Alliance'". *War in Context*. <http://warincontext.org/2015/09/27/hezbollah-joins-russia-iran-syria-and-iraq-in-4-1-alliance/>. Diakses pada 24 Mei 2016